



PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# PERUBAHAN RENCANA KERJA



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2025  
PANGKALPINANG  
2025

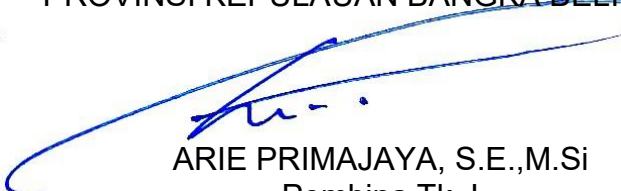
## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala nikmat, karunia, rahmat dan ridho Nya sehingga Rencan kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 telah diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan teknis tahunan yang merupakan landasan operasional program dan kegiatan serta sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isi dari rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Pangkalpinang, Juli 2025  
Pit. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ARIE PRIMAJAYA, S.E.,M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19751231 200312 1 007



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TW. II .....</b>	<b>11</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I.....	11
2.2 Analisis                      Kinerja                      Pelayanan                      Perangkat Daerah .....	12
<b>BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD .....</b>	<b>22</b>
3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	22
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>30</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja dapat diubah mengikuti perubahan dalam RKPD. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan PD secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Perubahan BPBD Tahun 2023 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra BPBD Tahun 2023-2026 serta memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan di lapangan sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan *output* dan memberikan *outcome* yang mendukung pencapaian target Renstra BPBD.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Nomor Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

- 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
- 18 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
- 19 Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri D).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, serta menyesuaikan suatu kondisi yang tidak lagi relevan dengan perencanaan yang telah dilakukan antara lain tidak sesuai asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas serta diperlukannya penyesuaian dengan Program Prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

- a) Menyediakan dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2025;
- b) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c) Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perubahan Rencana Kerja (Renja) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat/menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perubahan PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**

Memuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 hingga Triwulan I.

##### **BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD**

Memuat rencana kerja dan perubahan pagu perangkat daerah pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan dan penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

##### **BAB IV : PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I**

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2023 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) Tahun 2025.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan/sub kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Perangkat Daerah lain. Tabel 2.1 berikut ini menyajikan capaian kinerja dan penyerapan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.1

Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Triwulan I Periode Pelaksanaan Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	3	4		5		6		7		8		9		10	
	Mengurangi Risiko Bencana	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			10.766.195.855		1.654.417.612		-		-		-		1.654.417.612		15,37%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	36.904.400	-	2.750.000							-	2.750.000	0,00%	7,45%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	31.725.000	4	2.250.000						4	2.250.000	57,14%	7,09%	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			7.407.981.369		1.350.276.836		-		-		-		1.350.276.836		18,23%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	54	7.363.974.769	-	1.350.276.836							-	1.350.276.836	0,00%	18,34%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	220	5.487.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	15.040.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	8.479.300	-	-							-	-	0,00%	0,00%

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	3	4		5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	15.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			98.000.000		-		-		-		-		-		0,00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	98.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			454.590.300		8.220.000		-		-		-		8.220.000		1,81%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	47.219.800	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	88.556.100	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	24.112.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	24.911.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	9.802.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	3.600.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	30.093.900	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	40.295.000	1	4.120.000							1	4.120.000	25,00%	10,22%



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		
					I		II		III		IV		9		10		
1	2	3	3	4		5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	186.000.000	-	4.100.000							-	4.100.000	0,00%	2,20%
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			169.644.800		1.350.000		-		-		-		1.350.000		0,80%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	82.772.400	-	1.350.000							-	1.350.000	0,00%	1,63%
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	20.000.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	66.872.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			1.237.516.186		251.783.776		-		-		-		251.783.776		20,35%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	18.351.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	124.200.000	-	30.715.776							-	30.715.776	0,00%	24,73%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	76.389.686	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.018.575.500	1	221.068.000							1	221.068.000	8,33%	21,70%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			1.329.833.800		37.787.000		-		-		-		37.787.000		2,84%





No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	3	4		5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana (Orang)	100	85.790.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	*Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	70	28.987.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Keluarga)	30	71.624.400	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)	17	3.072.410.500	4	582.150.000							4	582.150.000	23,53%	18,95%
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	60	106.922.500	-	-							-	-	0,00%	0,00%
		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			257.793.700		-		-		-		-		-		0,00%



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Target s.d Tw II		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
							Rp	%
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>10.974.795.185,00</b>	50,00%	5.487.397.595,00	27,92%		5.027.121.366,00	45,81%
<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>73.180.080,00</b>	50,00%	36.590.040,00	5,72%		13.615.900,00	18,61%
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.955.680,00	50,00%	20.477.840,00	6,56%	0,02%	10.084.300,00	24,62%
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.483.400,00	50,00%	1.241.700,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.483.400,00	50,00%	1.241.700,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.478.400,00	50,00%	1.239.200,00	0,00%	0,00%	375.000,00	15,13%
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.499.400,00	50,00%	1.249.700,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.433.400,00	50,00%	1.216.700,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.846.400,00	50,00%	9.923.200,00	7,56%	0,01%	3.156.600,00	15,91%
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.901.570.257,00</b>	50,00%	3.450.785.129,00	32,80%		3.642.698.274,00	52,78%
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.856.568.757,00	50,00%	3.428.284.379,00	32,93%	14,97%	3.636.684.274,00	53,04%
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.612.800,00	50,00%	2.806.400,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.849.000,00	50,00%	7.924.500,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.539.700,00	50,00%	4.269.850,00	62,23%	0,04%	5.314.000,00	62,23%
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	50,00%	7.500.000,00	4,67%	0,00%	700.000,00	4,67%
<b>1.05.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%
1.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Target s.d Tw II		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
							Rp	%
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>493.186.032,00</b>	50,00%	246.593.016,00	5,54%		163.967.983,00	33,25%
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.221.800,00	50,00%	23.610.900,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.562.900,00	50,00%	44.281.450,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.143.400,00	50,00%	12.071.700,00	0,00%	0,00%	5.784.500,00	23,96%
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.925.500,00	50,00%	12.462.750,00	0,00%	0,00%	6.338.000,00	25,43%
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.692.832,00	50,00%	7.846.416,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	50,00%	3.600.000,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.144.600,00	50,00%	15.072.300,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.295.000,00	50,00%	20.147.500,00	6,78%	0,02%	6.692.000,00	16,61%
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.000.000,00	50,00%	107.500.000,00	11,43%	0,16%	145.153.483,00	67,51%
<b>1.05.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>756.976.173,00</b>	50,00%	378.488.087,00	61,53%		465.800.000,00	61,53%
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.460.200,00	50,00%	86.730.100,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	493.909.100,00	50,00%	246.954.550,00	94,30%	3,09%	465.800.000,00	94,31%
1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.727.273,00	50,00%	11.363.637,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.879.600,00	50,00%	33.439.800,00		0,00%	0,00	0,00%
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.351.748.520,00</b>	50,00%	675.874.260,00	18,43%		585.603.009,00	43,32%
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.351.000,00	50,00%	9.175.500,00	0,00%	0,00%	87.000,00	0,47%
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.200.000,00	50,00%	62.100.000,00	18,51%	0,15%	50.105.759,00	40,34%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Target s.d Tw II		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
							Rp	%
1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.589.520,00	50,00%	38.294.760,00	0,00%	0,00%	7.610.250,00	9,94%
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.132.608.000,00	50,00%	566.304.000,00	19,97%	1,50%	527.800.000,00	46,60%
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.398.134.123,00</b>	50,00%	699.067.063,00	3,85%		155.436.200,00	11,12%
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.412.000,00	50,00%	35.206.000,00	7,68%	0,04%	18.014.300,00	25,58%
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	941.006.000,00	50,00%	470.503.000,00	5,14%	0,32%	135.231.900,00	14,37%
1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.125.000,00	50,00%	6.562.500,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.591.123,00	50,00%	106.795.563,00	0,00%	0,00%	2.190.000,00	1,03%
1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000,00	50,00%	80.000.000,00		0,00%	0,00	0,00%
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>4.107.383.493,00</b>	50,00%	2.053.691.747,00	16,45%		1.711.387.844,00	41,67%
<b>1.05.03.1.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>118.999.900,00</b>	50,00%	59.499.950,00	0,00%		107.662.400,00	90,47%
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	118.999.900,00	50,00%	59.499.950,00	0,00%	0,00%	107.662.400,00	90,47%
<b>1.05.03.1.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>3.399.628.949,00</b>	50,00%	1.699.814.475,00	19,87%		1.455.192.000,00	42,80%
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.058.266.164,00	50,00%	1.529.133.082,00	22,09%	4,48%	1.339.800.000,00	43,81%
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	30.993.900,00	50,00%	15.496.950,00		0,00%	0,00	0,00%



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Target s.d Tw II		Realisasi			
		Sebelum Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
							Rp	%
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	152.926.600,00	50,00%	76.463.300,00	0,00%	0,00%	115.392.000,00	75,46%
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	85.799.000,00	50,00%	42.899.500,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	71.643.285,00	50,00%	35.821.643,00		0,00%	0,00	0,00%
<b>1.05.03.1.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>395.259.844,00</b>	50,00%	197.629.922,00	0,00%		28.827.244,00	7,29%
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	122.269.148,00	50,00%	61.134.574,00	0,00%	0,00%	28.827.244,00	23,58%
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	272.990.696,00	50,00%	136.495.348,00		0,00%	0,00	0,00%
<b>1.05.03.1.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>193.494.800,00</b>	50,00%	96.747.400,00	0,00%		119.706.200,00	61,87%
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	68.999.500,00	50,00%	34.499.750,00	0,00%	0,00%	61.650.200,00	89,35%
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	63.699.500,00	50,00%	31.849.750,00	0,00%	0,00%	58.056.000,00	91,14%
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4.797.400,00	50,00%	2.398.700,00		0,00%	0,00	0,00%
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	55.998.400,00	50,00%	27.999.200,00		0,00%	0,00	0,00%
		<b>15.082.178.678</b>	<b>50,00%</b>	<b>7.541.089.342</b>		<b>24,80%</b>	<b>6.738.509.210</b>	<b>44,68%</b>

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa dari 2 program, 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang dilaksanakan, realisasi kinerja sampai dengan Triwulan ke I sebesar 15,26% dengan predikat Sangat Rendah (SR), sedangkan realisasi keuangan sebesar 7,09 % dengan predikat Sangat Rendah (SR)..

Adapun kendala yang dihadapi terkait pencapaian target kinerja dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Adanya efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
2. Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Penanggulangan Bencana maka sebagian pelaksanaan kegiatan yang ada di BPBD akan dipengaruhi oleh kejadian/bencana yang tidak dapat diprediksi terjadinya.
3. Penyesuaian harga satuan barang dengan harga pasar menunggu anggaran perubahan sehingga beberapa pengadaan barang belum bisa dibelanjakan di APBD murni.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan I tersebut di atas, maka perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target tersebut yaitu :

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran kembali dan diusulkan untuk perubahan anggaran tahun berjalan.
2. Mengoptimalkan anggaran dan SDM yang ada dalam rangka pencapaian target kinerja program.
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka untuk pencapaian target kinerja program.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar tercapai target kinerja program.

## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri D), Badan Penanggulangan Bencana

Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sub urusan bidang bencana

Dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
3. Pemberian pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana;
4. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
5. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan dan/atau bantuan; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan berdasarkan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **“Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat”**.

Dalam rangka mewujudkan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran strategis BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rencana Strategis BPBD Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPBD PADA PERUBAHAN RENSTRA**  
**TAHUN 2017-2022**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			
			2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,36	0,37	0,38	0,39

### BAB III



## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD**

### **3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra BPBD Tahun 2023 - 2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi renja hingga triwulan I dan prioritas program dan kegiatan daerah. Perubahan rencana kerja tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel. 3.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)				Perkiraan Maju Tahun 2026		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
		Sebelum	Sesudah	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					Rp 14.659.887.205	Rp 13.856.805.505		Rp 17.845.530.066		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75.75	75.75	Rp 68.629.400	Rp 35.857.200	75.75	Rp 304.500.000	Berjalan	BPBD
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	82.88	82.88	Rp 10.697.566.455	Rp 10.054.272.255	82.88	Rp 11.092.765.066	Berjalan	BPBD
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dengan baik (dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	Rp 68.629.400	Rp 35.857.200	19 Dokumen	Rp 304.500.000	Berjalan	BPBD
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 36.904.400	Rp 18.532.200	2 Dokumen	Rp 210.000.000	Berjalan	BPBD

1.8	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	Rp 31.725.000	Rp 17.325.000	7 Laporan	Rp 94.500.000	Berjalan	BPBD
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan keuangan</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan keuangan</b>	<b>82.95 Nilai</b>	<b>82.95 Nilai</b>	<b>Rp 7.407.981.369</b>	<b>Rp 7.273.087.069</b>	<b>82.95 Nilai</b>	<b>Rp 7.863.435.269</b>	Berjalan	BPBD
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	54 Orang/Bulan	Rp 7.363.974.769	Rp 7.245.024.769	54 Orang/Bulan	Rp 7.779.435.269	Berjalan	BPBD
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220 Dokumen	220 Dokumen	Rp 5.487.300	Rp 2.583.000	220 Dokumen	Rp 15.750.000	Berjalan	BPBD
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 15.040.000	Rp 2.000.000	12 Dokumen	Rp 15.750.000	Berjalan	BPBD
2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 8.479.300	Rp 8.479.300	1 Laporan	Rp 26.250.000	Berjalan	BPBD
2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	12 laporan	Rp 26.250.000	Berjalan	BPBD
3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian</b>	<b>82.95 Nilai</b>	<b>82.95 Nilai</b>	<b>Rp 98.000.000</b>	<b>Rp 80.000.000</b>	<b>82.95 Nilai</b>	<b>Rp -</b>	Berjalan	BPBD



	<b>Perangkat Daerah</b>											
3.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	Rp 98.000.000	Rp 80.000.000	20 Orang	Rp -	Berjalan	BPBD	
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80.60 Nilai</b>	<b>80.60 Nilai</b>	<b>Rp 454.590.300</b>	<b>Rp 396.176.800</b>	<b>80.60 Nilai</b>	<b>Rp 620.287.761</b>	Berjalan	BPBD	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 47.219.800	Rp 47.219.800	1 Paket	Rp 47.241.075	Berjalan	BPBD	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 88.556.100	Rp 47.225.000	1 Paket	Rp 93.495.878	Berjalan	BPBD	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 24.112.000	Rp 24.112.000	1 Paket	Rp 30.450.000	Berjalan	BPBD	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 24.911.500	Rp 24.911.500	1 Paket	Rp 26.246.239	Berjalan	BPBD	
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 9.802.000	Rp 6.719.600	1 Paket	Rp 20.999.941	Berjalan	BPBD	
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	4 Dokumen	Rp 7.539.000	Berjalan	BPBD	
4.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 30.093.900	Rp 30.093.900	1 Paket	Rp 93.495.878	Berjalan	BPBD	

4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	Rp 40.295.000	Rp 40.295.000	4 Laporan	Rp 40.320.000	Berjalan	BPBD
4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 186.000.000	Rp 172.000.000	1 Laporan	Rp 260.499.750	Berjalan	BPBD
5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan</b>	<b>4 Unit</b>	<b>4 Unit</b>	<b>Rp 169.644.800</b>	<b>Rp 145.670.900</b>	<b>4 Unit</b>	<b>Rp 520.800.000</b>	Berjalan	BPBD
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Rp 82.772.400	Rp 62.269.200	2 Unit	Rp -	Berjalan	BPBD
5.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	1 Unit	Rp 169.050.000	Berjalan	BPBD
5.5	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	Rp 66.872.400	Rp 63.401.700	8 Unit	Rp 351.750.000	Berjalan	BPBD
6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 Jasa</b>	<b>10 Jasa</b>	<b>Rp 1.237.516.186</b>	<b>Rp 1.221.675.686</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>Rp 218.940.686</b>	Berjalan	BPBD
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	Rp 18.351.000	Rp 18.351.000	12 laporan	Rp 18.351.000	Berjalan	BPBD
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan	1 Laporan	Rp 124.200.000	Rp 124.200.000	1 Laporan	Rp 124.200.000	Berjalan	BPBD



			Disediakan								
6.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 76.389.686	Rp 76.389.686	4 Laporan	Rp 76.389.686	Berjalan	BPBD
6.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.018.575.500	Rp 1.002.735.000	12 Laporan	Rp 1.018.575.500	Berjalan	BPBD
<b>7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>103 Unit</b>	<b>103 Unit</b>	<b>Rp 1.329.833.800</b>	<b>Rp 937.661.800</b>	<b>103 Unit</b>	<b>Rp 1.564.801.350</b>	<b>Berjalan</b>	<b>BPBD</b>
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	Rp 70.289.600	Rp 41.689.600	3 Unit	Rp 67.725.000	Berjalan	BPBD
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit	Rp 904.561.600	Rp 591.061.600	38 Unit	Rp 941.551.275	Berjalan	BPBD
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	61 Unit	Rp 194.982.600	Rp 194.982.600	61 Unit	Rp 393.414.000	Berjalan	BPBD



7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp 160.000.000	Rp 109.928.000	1 Unit	Rp 162.111.075	Berjalan	BPBD
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Pra Bencana; Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana; Persentase Penanganan Pasca Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Pra Bencana; Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana; Persentase Penanganan Pasca Bencana</b>	<b>100%, 100%, 100%</b>	<b>100%, 100%, 100%</b>	<b>Rp 3.893.691.350</b>	<b>Rp 3.766.676.050</b>	<b>100%, 100%, 100%</b>	<b>Rp 6.448.265.000</b>	<b>Berjalan</b>	<b>BPBD</b>
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	Rp 116.899.700	Rp 44.549.200	7 Kab/Kota	Rp 420.000.000	Berjalan	BPBD
1.1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Rp 116.899.700	Rp 44.549.200	50 Orang	Rp 420.000.000	Berjalan	BPBD
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen kebencanaan yang tersedia; Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah jenis peralatan yang disediakan Jumlah kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana provinsi dan kabupaten/kota Jumlah kegiatan pengendalian operasi	6 Jenis; 3 Kegiatan; 4 Kegiatan	6 Jenis; 3 Kegiatan; 4 Kegiatan	Rp 3.365.734.900	Rp 3.395.488.900	6 Jenis; 3 Kegiatan; 4 Kegiatan	Rp 4.626.515.000	Berjalan	BPBD

2.1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	100 Orang	100 Orang	Rp 85.790.000	Rp 77.466.000	60 Orang	Rp 504.000.000	Berjalan	BPBD
2.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	17 Dokumen	60 Orang	Rp 28.987.500	Rp 22.704.000	17 Dokumen	Rp 3.427.515.000	Berjalan	BPBD
2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3 Unit	30 Keluarga	Rp 71.624.400	Rp 71.624.400	3 Unit	Rp 170.000.000	Berjalan	BPBD
2.5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	17 Dokumen	17 Dokumen	Rp 3.072.410.500	Rp 3.182.660.500	70 Orang	Rp 262.500.000	Berjalan	BPBD

2.7	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	60 Orang	60 Orang	Rp 106.922.500	Rp 41.034.000	1 Laporan	Rp 262.500.000	Berjalan	BPBD
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis logistik yang disediakan, Jumlah Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam	Jumlah Jenis logistik yang disediakan, Jumlah Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam	2 Jenis; 6 Kegiatan	2 Jenis; 6 Kegiatan	Rp 257.793.700	Rp 257.763.300	2 Jenis; 6 Kegiatan	Rp 774.750.000	Berjalan	BPBD
3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	15 laporan	15 laporan	Rp 68.266.600	Rp 68.236.200	15 laporan	Rp 414.750.000	Berjalan	BPBD
3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	340 Orang	340 Orang	Rp 189.527.100	Rp 189.527.100	340 Orang	Rp 360.000.000	Berjalan	BPBD
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kab/kota yang menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah; Jumlah kajian penanganan pasca bencana yang disusun	Jumlah kab/kota yang menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah; Jumlah kajian penanganan pasca bencana yang disusun	7 Kab/Kota, 2 Kajian	7 Kab/Kota, 2 Kajian	Rp 153.263.050	Rp 68.874.650	7 Kab/Kota, 2 Kajian	Rp 627.000.000	Berjalan	BPBD
4.1	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	1 Laporan	Rp 54.474.450	Rp 25.787.500	1 Laporan	Rp 220.000.000	Berjalan	BPBD



	Kab/Kota											
4.2	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	30 Orang	Rp 62.571.700	Rp 25.778.250	30 Orang	Rp 132.000.000	Berjalan	BPBD	
4.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	Rp 36.216.900	Rp 17.308.900	5 Kab/Kota	Rp 275.000.000	Berjalan	BPBD	
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 14.659.887.205</b>	<b>13.856.805.505</b>		<b>17.845.530.066</b>			



## BAB IV

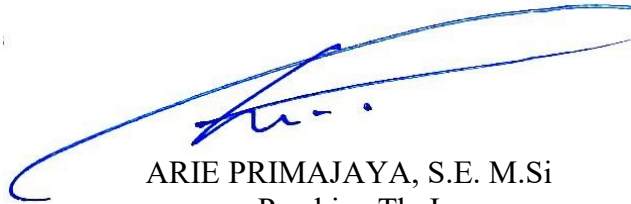
### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran RKP 2023-2026 yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005-2025.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diikuti dengan upaya upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2025 yang telah ditargetkan, dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pangkalpinang, Juni 2025  
Plt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ARIE PRIMAJAYA, S.E. M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19751231 200312 1 007

